

# RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2025 – 2029



**BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN PELABUHAN  
KELAS I PEKANBARU**

Jl. Rajawali Sakti No.44

Telp. (0761) 8417515, Fax. (0761) 8417515

*Emai : kkppekanbaru@gmail.com*

## KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan ini bertujuan untuk Meningkatkan Pelayanan Kekarantinaan di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan pertama untuk tahun RPJMN 2025-2029, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai terutama data-data yang digunakan sebagai bahan analisis situasi, prioritas program/kegiatan, dan upaya rencana aksi. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan dipintu masuk negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2025-2029 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Bidang dan seksi dibawah Satuan kerja, diharapkan RAK 2025-2029 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2025-2029 ini, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Dukungan Manajemen semoga bermanfaat bagi kita semua.



Pekanbaru, 02 Januari 2025  
Kepala

dr. Aryanti, MM, MKM  
NIP. 196906072001122001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	.....	i
Daftar Isi	.....	ii
BAB 1	Pendahuluan	1
	Latar Belakang	1
	Kondisi Umum	1
	Potensi Permasalahan	2
BAB II	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi	10
	Visi Misi	10
	Tujuan	11
	Sasaran Strategis	12
	Indikator Kinerja	15
	Arah Kebijakan dan Strategi	17
BAB III	Arah kebijakan strategis dan Kerangka Regulasi	20
	Kerangka Logis	20
	Rencana Kinerja	23
	Kerangka Kelembagaan	27
	Kerangka Regulasi	30
	Kerangka Pendanaan	31
BAB IV	Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Program	32
	Pemantauan	32
	Evaluasi	32
	Pengendalian	32
BAB V	Penutup	34
	Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Rencana Aksi Kegiatan merupakan perencanaan jangka menengah yang disusun satuan kerja yang memuat rencana kegiatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dalam suatu dokumen Rencana Aksi Kegiatan terdapat sasaran kegiatan dan sasaran kinerja yang diperjanjikan suatu instansi untuk lima tahun kedepan. Dalam perjalanannya senantiasa dokumen Rencana Aksi Kegiatan mengalami revisi yang diakibatkan oleh beberapa factor seperti adanya perubahan SOTK, revisi Renstra, revisi RAP, dan hasil penelahaan/pemeriksaan/ pengawasan oleh tim auditor.

Rencana Aksi Kegiatan periode 2025 – 2029 masih mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 dikarenakan belum tersusunnya Rencana Strategis Menteri Kesehatan tahun 2025-2029

### **B. Kondisi Umum**

Secara umum Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru pada tahun 2024, yang merupakan tahun akhir dari masa RPJMN 2020-2024 telah berhasil mencapai target dan indikator yang ditetapkan, BKK Kelas I Pekanbaru memperoleh penilaian SAKIP dengan hasil A, 84,45 pada tahun 2023. Secara rata-rata dari keseluruhan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan BKK Kelas I Pekanbaru tercapai sekitar 108,25% pada tahun 2024, dari target yang telah ditetapkan. Realisasi keuangan dari DIPA tanpa blokir sebesar 97,20% .Pencapaian- pencapaian indicator tersebut dijabarkan berikut ini:

- Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, Barang dan lingkungan (dokumen) terealisasi 101,05%
- Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan terealisasi 101,01%
- Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara terealisasi 117,65%
- Nilai kinerja anggaran terealisasi 108,84%
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terealisasi sebesar 102,22%

- Kinerja implementasi WBK satker terealisasi sebesar 115,41%
- Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL 118,58%
- Persentase realisasi anggaran sebanyak 101,25

### **Sumber Daya Manusia**

Jumlah Keseluruhan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru pada awal tahun 2025 yaitu sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dengan rincian :

- Pejabat struktural sebanyak 2 (dua) orang
- Jabatan fungsional tertentu ( JFT) sebanyak 58 (enam puluh satu) orang

### **C. Potensi Permasalahan**

#### **1. Peningkatan Penyakit Menular Berbasis Vektor dan Zoonosis**

Pada tahun 2025, BKK Kelas I Pekanbaru diperkirakan akan menghadapi peningkatan risiko penyakit menular berbasis vektor dan zoonosis. Laporan World Health Organization (WHO) tahun 2024 mencatat adanya tren kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD) dan malaria di wilayah tropis akibat perubahan iklim yang memperpanjang musim hujan dan memperluas habitat nyamuk *Aedes aegypti*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam prakiraan Desember 2024 menyatakan bahwa curah hujan tinggi di Riau pada awal 2025 dapat menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan vektor. Selain itu, risiko zoonosis seperti leptospirosis meningkat akibat banjir yang memfasilitasi kontak antara manusia dan hewan pembawa penyakit, seperti tikus.

BKK Pekanbaru, yang bertugas mengawasi Bandara Sultan Syarif Kasim II, pelabuhan, dan pos lintas batas darat, memiliki tanggung jawab sesuai Pasal 6 huruf b Permenkes 10/2023 untuk melakukan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada lingkungan, alat angkut, barang, dan orang. Pasal 6 huruf c lebih lanjut menetapkan kewajiban pencegahan terhadap risiko ini. Dalam konteks operasional, pelancong dari daerah endemis atau barang yang terkontaminasi vektor dapat menjadi sumber penularan jika tidak terdeteksi melalui pemeriksaan rutin. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah importasi penyakit ke wilayah Riau.

Namun, Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen P2P Nomor HK.02.02/C/334/2024, menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan fisik lingkungan dan pengendalian vektor. Keterbatasan alat, seperti perangkat fogging portabel atau fasilitas laboratorium lapangan untuk analisis cepat, dapat mengurangi efektivitas pengawasan. Banjir yang diproyeksikan juga berpotensi mengganggu akses ke area risiko di pelabuhan dan bandara. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas teknis dan logistik menjadi esensial untuk memastikan BKK Pekanbaru dapat mencegah penyebaran penyakit berbasis vektor dan zoonosis pada 2025.

## 2. Ancaman Penyakit Menular Emerging dan Re-emerging

Ancaman penyakit menular emerging dan re-emerging menjadi isu signifikan bagi BKK Kelas I Pekanbaru pada tahun 2025. Kementerian Kesehatan RI dalam Rakerkesnas 2024 menyoroti potensi kemunculan penyakit baru, yang disebut "Disease X," seiring dengan meningkatnya mobilitas global. Pekanbaru, sebagai pusat transportasi di Riau, merupakan lokasi strategis yang menghubungkan pelancong domestik dan internasional. Selain itu, laporan Kemenkes mencatat peningkatan kasus tuberkulosis (TB) resisten obat, yang didorong oleh faktor kepadatan penduduk dan akses kesehatan yang terbatas di beberapa wilayah.

Sesuai Pasal 6 huruf d Permenkes 10/2023, BKK Pekanbaru memiliki fungsi untuk merespons penyakit dan faktor risiko kesehatan, sementara Pasal 6 huruf f menegaskan tugas penindakan pelanggaran kekarantinaan kesehatan. Tugas ini dijalankan oleh Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus, yang meliputi pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan evaluasi fisik pelaku perjalanan. Deteksi penyakit emerging atau varian penyakit lama memerlukan teknologi skrining sensitif dan keahlian khusus, mengingat gejala awal sering kali tidak spesifik. Respons yang tertunda dapat memperburuk penyebaran lintas wilayah, terutama di hub transportasi seperti Pekanbaru.

Kapasitas petugas dan peralatan menjadi faktor kunci dalam menghadapi ancaman ini. Keterbatasan pelatihan untuk mengidentifikasi tanda-tanda penyakit baru,

ditambah dengan kurangnya alat deteksi cepat seperti PCR portabel, dapat menghambat kemampuan BKK untuk bertindak sesuai regulasi. Proses rujukan ke laboratorium eksternal juga memakan waktu, yang berpotensi menunda respons. Pada tahun 2025, BKK Pekanbaru perlu memperkuat infrastruktur teknologi dan kompetensi petugas untuk meminimalkan risiko menjadi titik awal penyebaran penyakit menular baru atau berulang.

### 3. Gangguan Kesehatan Akibat Faktor Risiko Lingkungan dan Alat Angkut

Gangguan kesehatan akibat faktor risiko lingkungan dan alat angkut diperkirakan akan menjadi tantangan penting bagi BKK Kelas I Pekanbaru pada 2025. Badan POM dalam laporan tahunan 2024 mencatat peningkatan kasus keracunan makanan akibat sanitasi buruk pada kapal dan pesawat, serta infeksi saluran pernapasan terkait kualitas udara di alat angkut. Di Riau, polusi udara akibat kebakaran hutan (haze) diperkirakan akan kembali terjadi pada 2025, khususnya pada musim kemarau, sebagaimana tren historis yang dilaporkan BMKG. Kondisi ini dapat memperburuk kesehatan penumpang dan kru yang transit melalui Bandara SSK II dan pelabuhan.

BKK Pekanbaru memiliki tugas sesuai Pasal 6 huruf b Permenkes 10/2023 untuk mengawasi faktor risiko kesehatan pada alat angkut dan lingkungan, serta Pasal 6 huruf c yang mewajibkan pencegahan risiko tersebut. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang bertanggung jawab memeriksa dokumen kesehatan, melakukan inspeksi fisik, dan menerapkan tindakan seperti dekontaminasi. Namun, volume lalu lintas yang tinggi di wilayah kerja dapat menyulitkan pengawasan menyeluruh. Ketidapatuhan operator transportasi terhadap standar sanitasi, seperti pelaporan limbah yang tidak konsisten, menambah kompleksitas tugas ini.

Efektivitas pengawasan bergantung pada ketersediaan sumber daya dan koordinasi lintas sektor. Keterbatasan waktu dan alat untuk inspeksi mendalam dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti infeksi atau keracunan massal. Polusi udara akibat haze juga memerlukan upaya penyehatan lingkungan yang intensif, yang membebani operasional petugas. Untuk mengatasi tantangan ini pada 2025, BKK Pekanbaru harus meningkatkan kapasitas inspeksi dan mempererat

hubungan kerja dengan otoritas bandara, pelabuhan, serta dinas lingkungan guna memastikan standar kesehatan terpenuhi.

#### 4. Kegawatdaruratan Kesehatan di Situasi Khusus

Kegawatdaruratan kesehatan pada situasi khusus menjadi fokus utama bagi BKK Kelas I Pekanbaru pada 2025, mengingat potensi lonjakan mobilitas selama mudik Lebaran, pelaksanaan haji, atau acara mass gathering di Riau. Periode ini sering kali meningkatkan risiko kejadian medis seperti serangan jantung akibat kelelahan, heatstroke karena suhu tinggi, atau wabah mendadak seperti gastroenteritis akibat sanitasi buruk. Pekanbaru, sebagai pusat transportasi regional, akan menghadapi tekanan signifikan di Bandara SSK II dan pelabuhan saat ribuan penumpang transit dalam waktu singkat.

Pasal 6 huruf e Permenkes 10/2023 menetapkan tugas BKK untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan memberikan pelayanan medis darurat. Namun, peningkatan permintaan layanan ini dapat melebihi kapasitas fasilitas yang ada. Ruang perawatan darurat yang terbatas atau kurangnya peralatan medis memadai berpotensi menghambat respons terhadap kasus serentak, terutama dalam kondisi cuaca ekstrem atau kepadatan tinggi.

Keberhasilan penanganan situasi khusus bergantung pada kesiapan logistik dan tenaga. Stok obat-obatan, alat medis portabel, dan petugas tambahan harus tersedia untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan. Koordinasi dengan rumah sakit rujukan juga perlu diperkuat melalui rencana kontingensi yang terstruktur. Pada 2025, BKK Pekanbaru harus memastikan fasilitas dan prosedur darurat diperbarui secara berkala untuk menjamin respons yang cepat dan efektif, sehingga mendukung keselamatan publik di wilayah kerjanya.

#### 5. Pelanggaran Kekarantinaan dan Data Kesehatan

Pelanggaran kekarantinaan dan pengelolaan data kesehatan akan menjadi isu strategis bagi BKK Kelas I Pekanbaru pada 2025. Direktorat Jenderal P2P dalam

laporan 2024 mencatat bahwa pelanggaran seperti pemalsuan dokumen kesehatan oleh pelaku perjalanan masih berlangsung, mencakup sertifikat vaksinasi atau hasil tes yang tidak valid. Selain itu, keterlambatan pelaporan data kesehatan menjadi kendala nasional yang memengaruhi kemampuan surveilans penyakit. Di Pekanbaru, kasus ini dapat terjadi di bandara atau pelabuhan, memengaruhi keakuratan pengendalian risiko kesehatan.

BKK Pekanbaru memiliki fungsi sesuai Pasal 6 huruf f Permenkes 10/2023 untuk menindak pelanggaran kekarantinaan kesehatan, dan Pasal 6 huruf g untuk mengelola data dan informasi. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran bertugas mengidentifikasi pelanggaran, menganalisis data, dan menyiapkan sanksi administratif. Namun, jika sistem validasi dokumen masih bergantung pada metode manual, deteksi pelanggaran menjadi kurang efisien. Demikian pula, tanpa sistem informasi terintegrasi, pelaporan data real-time dapat tertunda, mengurangi kemampuan untuk mendeteksi potensi kejadian luar biasa (KLB) secara dini.

Modernisasi teknologi dan pelatihan petugas menjadi kebutuhan mendesak. Penggunaan pemindai cerdas untuk validasi dokumen dan platform digital untuk pelaporan data dapat meningkatkan efektivitas tugas tim kerja. Dukungan anggaran dan kebijakan lokal akan menentukan keberhasilan implementasi ini. Pada 2025, BKK Pekanbaru perlu memperkuat infrastruktur digital dan koordinasi dengan pihak terkait untuk menegakkan regulasi kekarantinaan serta menyediakan data yang akurat dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.

#### Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BKK Pekanbaru disarankan untuk:

- menyediakan peralatan pengendalian vektor dan fasilitas laboratorium lapangan;
- mengadopsi teknologi skrining canggih seperti yang diterapkan BKK Surabaya;
- memperkuat jejaring dengan Dinas Kesehatan dan operator transportasi;
- melaksanakan simulasi kegawatdaruratan secara rutin;
- menerapkan sistem informasi kesehatan berbasis digital.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

BKK mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, pengawasan OMKABA serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Berdasarkan PERMENKES RI Nomor 10 tahun 2023 tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekekarantinaan Kesehatan, dalam melaksanakan tugasnya, BKK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan
- c. pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- d. pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
- e. pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus; f.
- f. pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;
- g. pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
- h. pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
- k. pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Kekekarantinaan Kesehatan.

**Tabel I.1**  
**Keterkaitan Tupoksi BKK dengan Tugas dan Fungsi Setiap Tim Kerja**  
*(crosscutting)*

No	Tugas Pokok Dan Fungsi BKK	Keterkaitan dengan Tupoksi Timker 1 sd 5 dan Subbag Adum					
		Timker	Timker	Timker	Timker	Timker	Adum
		1	2	3	4	5	
1	penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran						
2	pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan (4 TIMKER)						
3	pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;						
4	pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan; (4 TIMKER)						
5	pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;						

6	pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan kesehatan;						
7	pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan; 5 TIMKER/SUBAG						
8	pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;						
9	pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;						
10	pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan;						
11	penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran						

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

#### A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Laporan RAK ini masih mengacu pada Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, dikarenakan belum disahkannya Renstra Kementerian Kesehatan 2025-2029 sampai disusunnya laporan RAK ini.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi BKK yakni:

- 1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;**
- 2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;**
- 3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;**
- 4. Peningkatan Sumber Data Manusia.**

## **B. Tujuan Strategis**

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhi SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka BKK telah menetapkan tujuan strategis BKK yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2029**

### C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen Penanggulangan Penyakit yakni:

1. Meningkatkan upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatkan kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatkan kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatkan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun

9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis BKK telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.

#### D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja BKK pada RAK awal tahun 2025-2029 dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel II.1**  
**Indikator BKK Tahun 2025-2030**

SASARAN	NO	INDIKATOR
Meningkatnya Pelayanan Kekarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara
	2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
	6	Kinerja implementasi WBK satker
	7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL
	8	Persentase realisasi anggaran

Tahun 2025-2029, BKK telah menetapkan 8 indikator yakni:

1. Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara

Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara menggambarkan kinerja deteksi dini factor risiko dipintu masuk negara. Indeks dihitung dari 4 parameter yakni persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar dan persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar

2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan.

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh BKK.

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan.

4. Nilai kinerja anggaran

Indikator ini merupakan indicator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BKK dari sisi penyerapan anggaran, konsistensi RPD, capaian keluaran kegiatan, efisiensi, dan nilai efisiensi, dimana nilai tersebut sudah terakumulasi dengan rata- rata geometrik dan ditampilkan pada dashboard aplikasi online Kementerian Keuangan SMART DJA.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja BKK dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

6. Kinerja implementasi WBK satker

Sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran merupakan pelaksanaan anggaran yang sudah disusun pada tahun sebelumnya. Realisasi anggaran ini datanya dapat diambil pada data omspan, yang merupakan aplikasi online Kementerian Keuangan.

**E. Arah Kebijakan dan Strategi**

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas

Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

BKK telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sector dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan BKK tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

a) Indeks deteksi faktor risiko dipintu masuk negara

Untuk mencapai indicator indeks deteksi dini factor risiko penyakit dilakukan strategi sebagai berikut:

- Melakukan Pemeriksaan alat angkut yang datang dari luar negeri dan dalam negeri terjangkau melalui pemeriksaan dokumen kesehatan pada kapal dan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada alat angkut.
- Melakukan monitoring evaluasi pencapaian kegiatan yang dilaksanakan per bulan.

b) Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

Untuk mencapai indicator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dilakukan strategi sebagai berikut:

- Membuat rencana kegiatan (jadwal, petugas yang melaksanakan, sarana dan prasarana).
- Melengkapi sarana dan prasarana yang akan digunakan pada saat melaksanakan kegiatan.
- Mengupdate SOP-SOP sesuai dengan kondisi pandemic.
- Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugas.
- Melakukan koordinasi dengan lintas program/sector dalam melaksanakan setiap kegiatan baik kegiatan rutin yang dilaksanakan di Bandara maupun pelabuhan.

- Melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan terbaru sehingga dapat diimplementasikan bersama dan adanya persamaan persepsi dalam melaksanakannya.
  - Gencar melaksanakan edukasi dan skrining penyakit menular langsung (HIV AIDS dan Tb) terhadap masyarakat yang ada di wilayah kerja BKK Kelas I
  - Melaksanakan desiminasi informasi hasil dari kegiatan skrining yang sudah dilaksanakan, yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut dan juga mencari solusi jika ada hambatan/kendala di lapangan.
  - Melakukan tindakan penyehatan terhadap kapal yang ditemukan FR keberadaan vektor dan BPP,
  - Koordinasi dengan agen pelayaran dan pihak ketiga (BUS)
  - Sosialisasi dan koordinasi dengan agen pelayaran
  - Koordinasi dengan penanggungjawab terminal pelabuhan/bandara, dan pengelolaan TPM
  - Pengawasan penumpang dan orang sakit yang datang dan berangkat di bandara dan Pelabuhan
  - Pengawasan penumpang datang dan berangkat di Bandara dan Pelabuhan Pelabuhan dan Bandara
  - Koordinasi dengan Pihak Airline dan Pt. Angkasa Pura II serta pihak terkait
  - Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pihak Airline dan Pt. Angkasa Pura II serta pihak terkait
- c) Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
- Untuk mencapai indicator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan strategi sebagai berikut:
- Melakukan tindakan penyehatan terhadap kapal yang ditemukan faktor risiko keberadaan vektor dan BPP.
  - Koordinasi dengan agen pelayaran dan pihak ketiga (BUS) terkait pengendalian vektor.
  - Sosialisasi dan koordinasi dengan agen pelayaran
  - Koordinasi dengan penanggungjawab terminal pelabuhan/bandara, dan pengelolaan TPP dalam pengawasan sanitasi lingkungan.
  - Mensosialisasikan UU No 6 Tahun 2018.
  - Sosialisasi dan Koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan dan PT. Angkasa Pura II serta pihak terkait

- Melakukan pengawasan penanganan limbah medis pada kegiatan pelayanan kesehatan di BKK Kelas I Pekanbaru
- d) Nilai kinerja anggaran
- Untuk mencapai indicator Nilai kinerja anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:
- Koordinasi yang baik antara operator penginput SMART dja dengan pemegang kegiatan
  - Secara disiplin melakukan penginputan data
  - revisi halaman III DIPA sesuai kebutuhan
  - Terinputnya semua data yang harus diisi secara berkesinambungan
- e) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Untuk mencapai indicator Indeks Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:
- Penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja satker yang disebabkan oleh kondisi kahar (force major) yang disebabkan oleh risiko penyebaran COVID 19, serta memperhatikan mengenai penilaian IKPA.
  - Menyesuaikan Halaman III DIPA pada saat revisi
  - Dengan segera melakukan penyelesaian pagu minus, sehingga pencairan anggaran tidak terkendala
  - Melaporkan data kontrak tepat waktu
  - Adanya perhatian terhadap tenggat waktu UP dan TUP
  - Menyampaikan LPJ Bendahara tepat waktu
  - Pelaksanaan kegiatan memperhatikan output, dan melaporkan secara berkala
- f) Kinerja implementasi WBK satker
- Untuk mencapai indicator Kinerja implementasi WBK satker dilakukan strategi sebagai berikut:
- Pembentukan Tim WBK BKK Kelas II Pekanbaru
  - Penyiapan dokumen pendukung/bukti fisik
  - Entri dan Upload data di Sipinal (Sistim penilaian internal)
  - Pre assessment dengan Irjen Inventigasi
  - Pendampingan dengan Irjen Pembina (Inspektorat III)
  - Reviu indicator dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P

g) Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Untuk mencapai indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya dilakukan strategi sebagai berikut:

- Walaupun di masa pandemic, dan kontak dengan banyak orang dihindari, dan dibatalkannya beberapa pelatihan akan tetapi pegawai BKK kelas II Pekanbaru tetap mendapatkan penambahan kompetensi melalui daring/online

h) Persentase Realisasi Anggaran

Untuk mencapai indikator realisasi anggaran sesuai dengan yang ditargetkan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan
- melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- meningkatkan monitoring dan evaluasi

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS DAN KERANGKA REGULASI

### A. Kerangka Logis

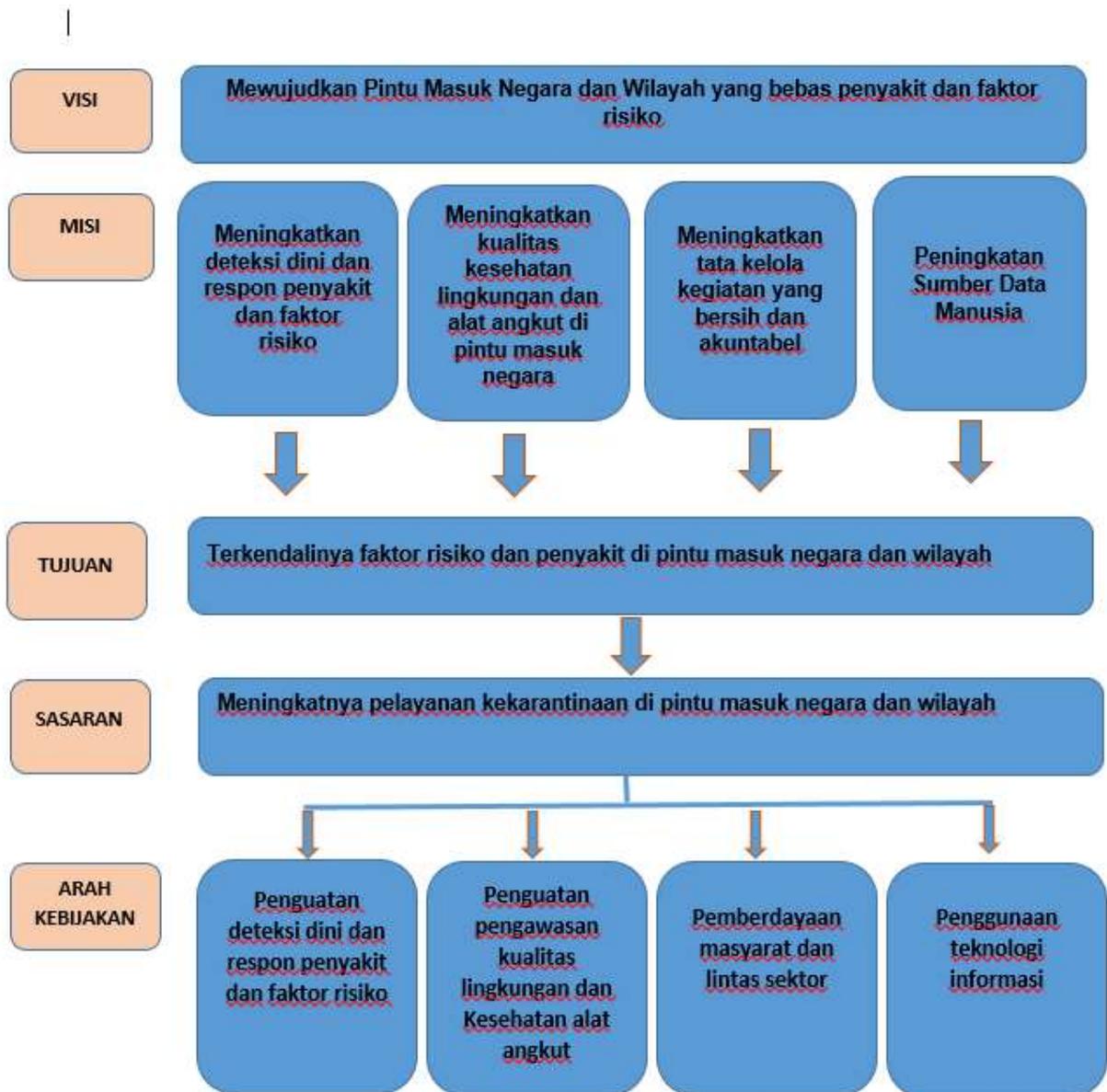
Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing, Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya dan Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, melalui Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Menurunkan angka *stunting* pada balita, Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional dan Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru sebagai unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian penyakit mendukung pelaksanaan penjabaran visi misi presiden yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

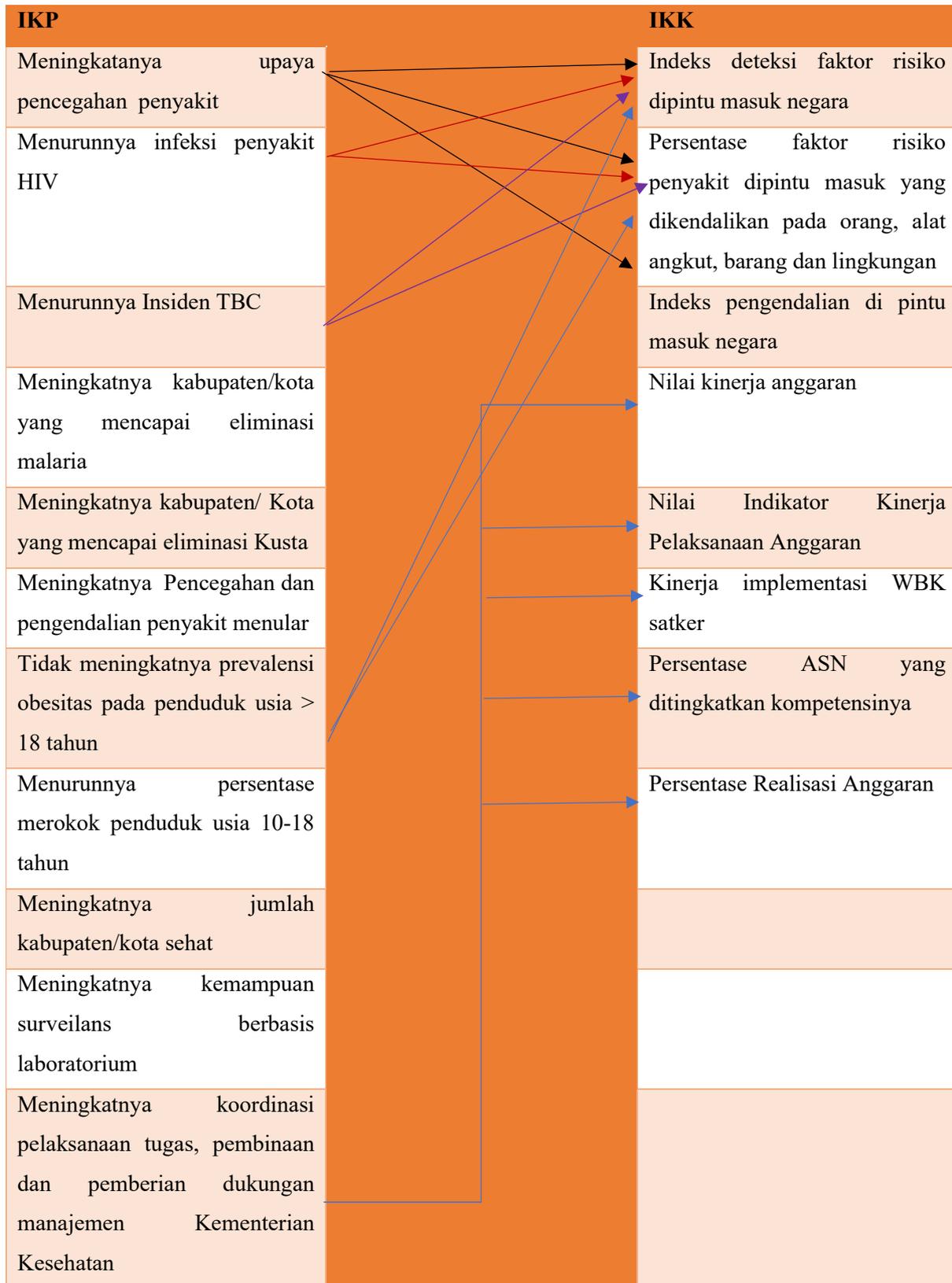
Gambar III.1

Cascading Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan



**Gambar III.2**

**Cascading Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan**



## B. Rencana Kegiatan

### *Target Kinerja*

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2029. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2029.

SASARAN	NO	INDIKATOR	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Pelayanan Kekejarantinaan di Pintu Masuk Negara dan Wilayah	1	Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96
	2	Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	96%	96%	97%	97%	98%
	3	Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	0,88	0,88	0,89	0,89	0,9
Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	4	Nilai kinerja anggaran	84	84	85	85	86
	5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	94	95	95	96
	6	Kinerja implementasi WBK satker	75	76	77	78	79
	7	Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	92%	92%	93%	93%	94%
	8	Persentase realisasi anggaran	96%	96%	96%	96%	96%

### *Kegiatan*

Berikut kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian kinerja

1. Untuk mencapai target indikator indeks pengendalian deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara dilakukan kegiatan yakni:
  - ❖ Bimbingan Tekhnis Kekejarantinaan ke Wilayah Kerja
  - ❖ Koordinasi Edukasi dan Pemeriksaan HIV dan TB oleh Dokter, Perawat dan Nakes lainnya
  - ❖ Pelayanan Kesehatan di Poliklinik
  - ❖ Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV
  - ❖ Edukasi dan Skrinning HIV, Tb di Wilker

- ❖ Pengawasan Kualitas Udara di Pelabuhan dan Bandara
  - ❖ Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan pada Embarkasi Haji Antara Riau
  - ❖ Surveilans Epidemiologi Penyakit Di Wilayah Kerja Pelabuhan dan Bandara
  - ❖ Surveilans Kesehatan Kapal, Orang Dan Barang Dalam Rangka Penyelenggaraan Kekekarantinaan
  - ❖ Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja di Lingkungan Pelabuhan/ Bandara
  - ❖ Pelaksanaan kekarantinaan kesehatan di bandara
  - ❖ Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit HIV AIDS
  - ❖ Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit TB
  - ❖ Belanja Bahan Untuk Pelayanan Kesehatan
2. Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
- ❖ Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Embarkasi/Debakasi Antara Riau ke BKK Kelas I Batam
  - ❖ Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debakasi Antara Provinsi Riau
  - ❖ Rapat Persiapan Kegiatan Embarkasi Haji Antara Riau
  - ❖ Evaluasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di EHA
  - ❖ Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji di Kabupaten
  - ❖ Pengawasan Vaksinasi Bagi Calon Jemaah Haji di Kabupaten/Kota
  - ❖ Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Jamaah Calon Haji di Kabupaten
  - ❖ Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Jamaah Haji Setelah Kepulangan di Kabupaten melalui pengawasan K3JH
  - ❖ Monev Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi haji antara Provinsi Riau
  - ❖ Pelayanan kesehatan pada situasi gawat darurat dan rujukan
  - ❖ Pelayanan kesehatan situasi khusus
  - ❖ Pengawasan Terhadap RS/Klinik Yang Melaksanakan Penerbitan ICV
  - ❖ Pengelolaan Limbah Medis
  - ❖ Pengawasan Kasus HIV-AIDS/TB/Penyakit Menular Lainnya Pada ABK / Masyarakat Pelabuhan / Kelompok Risiko Tinggi di Pelabuhan dan Bandara
  - ❖ Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi

- ❖ Operasional Petugas Pengawasan Suhu Tubuh dan Kartu Kewaspadaan ( HAC/eHAC) di Bandara dan Pelabuhan Pada Situasi Wabah/KLB/KKM
  - ❖ Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan - pnbp
  - ❖ Belanja Bahan dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Haji
  - ❖ Belanja bahan pelayanan vaksinasi
3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
- ❖ Pembinaan Pengawasan Higiene Sanitasi TPP di Wilayah Pelabuhan/Bandara
  - ❖ pengendalian vektor DBD
  - ❖ Pemetaan
  - ❖ Persiapan Bahan dan Alat
  - ❖ Pemasangan Perangkap
  - ❖ Identifikasi Tikus dan Pinjal
  - ❖ pengendalian vektor Diare
  - ❖ Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit DBD
  - ❖ Survei Jentik
  - ❖ pengendalian vektor Diare
  - ❖ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor
  - ❖ Penyediaan Reagensia dalam rangka Pemeriksaan Kualitas Makanan, Minuman, dan Air
4. Nilai kinerja anggaran
- ❖ Analisi Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai (konsultasi kepusat bidang kepegawaian)
  - ❖ Konsultasi Kepala Kantor
  - ❖ Medical Check Up ASN
  - ❖ Penyusunan dokumen RKAKL
  - ❖ Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan anggaran dan revisi anggaran
  - ❖ Penyusunan TR PNPB
  - ❖ Bimtek Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke Wilker
  - ❖ Konsultasi/Koordinasi ke KPPN
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- ❖ Langganan Aplikasi Meeting Berbayar
  - ❖ Pembayaran gaji dan tunjangan
  - ❖ Operasional dan Pemeliharaan Kantor
  - ❖ Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
  - ❖ Pengadaan Alat Pengolah Data
  - ❖ Pengadaan Alat Studio
  - ❖ Pengadaan Alat Kesehatan
6. Kinerja implementasi WBK satker
- ❖ Pengelolaan Kantor Berhias
  - ❖ Pelayanan Pengadaan barang dan jasa (konsultasi pengadaan barang dan jasa)
  - ❖ Penyusunan RUP
  - ❖ Penyusunan Laporan e-monev Bapennas
  - ❖ Evaluasi SAKIP
  - ❖ Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kerja, Laporan Tahunan, profil
  - ❖ Penyusunan Laporan Keuangan
  - ❖ Rekonsiliasi PNBPN ke Wilker
  - ❖ Inventarisasi BMN ke Wilker
  - ❖ Pengelolaan Arsip
  - ❖ Penyusutan arsip di lingkungan Ditjen P2P
  - ❖ Diseminasi/Promosi Informasi Kegiatan Melalui Penyusunan Media KIE
  - ❖ Pertemuan RKBMN
7. Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya
- ❖ Pelatihan Bidang Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi
  - ❖ Pelatihan di bidang vektor
  - ❖ Webinar di Bidang Pelayanan Kesehatan
  - ❖ Peningkatan Kompetensi/Diklat/Ujian Kompetensi
  - ❖ Latsar CPNS dan PPPK
  - ❖ Pelatihan di bidang kesekretariatan
8. Persentase Realisasi Anggaran
- ❖ Penyusunan anggaran melalui 3 tahapan yaitu: e renggar, pagu indikatif, pagu defenitif

- ❖ Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan anggaran dan revisi anggaran

#### **D. Kerangka Kelembagaan**

Adanya perubahan SOTK terbaru, sesuai dengan:

1. Diktum Keempat Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dibentuk tim kerja, untuk itu BKK Kelas I Pekanbaru saat ini mempunyai 5 tim kerja, 1 subbag, 6 wilker dan 1 pos pelayanan.
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 209);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2149/2023 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Pembentukan Tim Kerja Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan,
7. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan.

Tupoksi dari 5 tim kerja tersebut dapat dilihat

1. Tim Kerja Surveilans dan Penindakan Pelanggaran Kekeantinaan Kesehatan
  - Pelaksanaan surveilans penyakit dan faktor risiko kesehatan yang berpotensi menyebabkan KLB dan wabah
  - Pelaksanaan surveilans faktor risiko kesehatan lingkungan
  - Pelaksanaan surveilans vektor dan binatang pembawa penyakit
  - Pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, serta diseminasi informasi kekeantinaan kesehatan
  - Pelaksanaan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan kekeantinaan Kesehatan
  - Penanggulangan KLB dan wabah yang berpotensi menyebar lintas wilayah dan negara
  - Pelaksanaan identifikasi dan pemantauan potensi/dugaan pelanggaran kekeantinaan kesehatan
  - Pelaksanaan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran kekeantinaan kesehatan
  - Penyiapan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran kekeantinaan kesehatan
2. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
  - Pengawasan faktor risiko kesehatan pada alat angkut melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya, dan/atau pemeriksaan fisik pada alat angkut pada saat keberangkatan dan kedatangan
  - Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap alat angkut
  - Pelaksanaan tindakan kekeantinaan kesehatan pada alat angkut
  - Pengawasan faktor risiko kesehatan pada barang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada barang
  - Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap barang
  - Pelaksanaan tindakan pengendalian pada barang diantaranya berupa kegiatan disinfeksi, dekontaminasi, dan pemusnahan barang yang berisiko
3. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Lingkungan
  - Pengawasan faktor risiko kesehatan pada lingkungan melalui pemeriksaan dokumen kesehatan, pemeriksaan fisik, dan/atau pemeriksaan laboratorium pada lingkungan
  - Penerbitan dokumen kesehatan pada lingkungan

- Pelaksanaan tindakan penyehatan media lingkungan, termasuk pada situasi khusus
  - Pelaksanaan tindakan pengamanan limbah, termasuk pada situasi khusus
  - Pelaksanaan tindakan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk pada situasi khusus
4. Tim Kerja Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus
- Pengawasan penyakit menular dan faktor risiko kesehatan pada orang melalui pemeriksaan dokumen karantina kesehatan, dokumen lainnya dan/atau pemeriksaan fisik pada orang
  - Pelaksanaan vaksinasi internasional atau profilaksis
  - Penerbitan dokumen karantina kesehatan dan dokumen lainnya terhadap orang
  - Pemeriksaan kesehatan pelaku perjalanan dan masyarakat pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara
  - Penerbitan surat rekomendasi penolakan dan penundaan keberangkatan pelaku perjalanan
  - Pelaksanaan tindakan kekarantinaan kesehatan pada orang, antara lain karantina, rujukan, isolasi, disinfeksi, dan dekontaminasi
  - Pelaksanaan pelayanan kesehatan kegawatdaruratan medik
  - Pengawasan, pencegahan, dan respon pada situasi khusus, antara lain arus mudik dan balik, haji dan umroh, Pekerja Migran Indonesia (PMI), acara kenegaraan, acara internasional, serta mass gathering
5. Tim Kerja Layanan Publik dan Zona Integritas
- Penyediaan bahan media informasi publik
  - Pengelolaan dan pelayanan informasi publik
  - Pengelolaan pengaduan masyarakat
  - Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
  - Pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan
  - Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

## **E. Kerangka Regulasi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan.

Saat ini sudah tersedia regulasi, anantara lain :

1. UU No 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan
2. Permenkes No. 23 Tahun 2018 tentang Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional
3. Permenkes 2348 tahun 2011 tentang perubahan atas Permenkes 356 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
4. Permenkes No.33 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi BKK
5. SOP di bidang tata usaha (36 SOP)
6. SOP di bidang kekarantinaan kesehatan (17 SOP)
7. SOP di bidang Pengendalian Risiko Lingkungan (18 SOP)
8. SOP di bidang Upaya Pengendalian Kesehatan Lintas Wilayah (11 SOP)

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis BKK Kelas II Pekanbaru, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi tentang tindak lanjut pengawasan penderita HIV AIDS yang positif terhadap ABK Kapal
2. Regulasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja pegawai di pelabuhan dan bandara
3. SOP di bidang penindakan pelanggaran terhadap UU Kekarantinaan Kesehatan

## Kerangka Pendanaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU					Penanggung Jawab
	2025	2026	2027	2028	2029	
Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	774.575.000	790.066.500	805.867.830	821.985.187	838.424.890	Timker 1 -4
Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	458.868.000	468.045.360	477.406.267	486.954.393	496.693.480	Timker 1 -4
Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negra	939.122.000	957.904.440	977.062.529	996.603.779	1.016.535.855	Timker 1 -4
Nilai kinerja anggaran	310.462.000	316.671.240	323.004.665	329.464.758	336.054.053	ADUM
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	15.413.808.000	15.722.084.160	16.036.525.843	16.357.256.360	16.684.401.487	
Kinerja implementasi WBK satker	107.051.000	109.192.020	111.375.860	113.603.378	115.875.445	ADUM
PersentaseASN yang ditingkatkan kapasitasnya	532.189.000	542.832.780	553.689.436	564.763.224	576.058.489	TIMKER 5
Persentase realisasi anggaran	180.608.000	184.220.160	187.904.563	191.662.654	195.495.908	TIMKER 1- 5, ADUM
<b>TOTAL</b>	<b>18.716.683.000</b>	<b>19.091.016.660</b>	<b>19.472.836.993</b>	<b>19.862.293.733</b>	<b>20.259.539.608</b>	

## **BAB IV**

### **PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PROGRAM**

#### **A. Pemantauan**

- Pemantauan data kinerja dilakukan secara berkesinambungan setiap bulannya, melalui laporan, maupun melalui rapat bulanan
- Pemantauan secara elektronik dilakukan melalui pengisian capaian melalui aplikasi online e monev DJA, e monev Bappenas, dan e performance

#### **B. Evaluasi**

- Evaluasi capaian kinerja kegiatan (IKK) dan evaluasi capaian anggaran dilakukan setiap bulannya melalui mekanisme rapat bulanan. Selain evaluasi capaian, juga dilakukan evaluasi terhadap RPD dan RPK, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat terkontrol secara teratur

#### **C. Pengendalian**

Peran Kepala Satker dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan

- Membuat kebijakan berupa Nota Dinas, Surat Edaran, SOP dan pemetaan resiko setiap kegiatan agar kegiatan pengendalian terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan target yang ditetapkan.
- Koordinasi dan advokasi dengan stakeholder terkait sehingga kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit mendapat dukungan
- Konsultasi ke Pusat khususnya Ditjen P2P tentang pelaksanaan kegiatan baik secara virtual maupun luring.
- Berperan sebagai role model dalam setiap aspek kegiatan
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan dengan mengadakan rapat per triwulan.
- Melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan baik di kantor induk maupun di wilayah kerja
- Memberikan arahan terhadap permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan.

Alur yang dilakukan ketika kantor mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Ketika kantor menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- Penanggung jawab kegiatan melaporkan adanya permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan kegiatan kepada koordinator wilayah kerja
- Jika permasalahan yang ditemui tidak dapat diatasi di tingkat wilayah kerja, koordinator wilayah kerja melaporkan kepada ketua tim kerja.
- Ketua tim kerja mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemui, jika ketua tim kerja tidak dapat mengatasi permasalahan tersebut, kemudian diteruskan kepada kepala kantor.
- Kepala kantor menerima laporan terhadap permasalahan yang ada dan mencari solusi dengan mengandakan rapat dengan semua tim kerja/subag Adum dan bila perlu dengan membahas pada rapat triwulan dengan seluruh pegawai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Pekanbaru Tahun 2025-2029 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya BKK Kelas I Pekanbaru dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dengan demikian subbag dan Tim kerja di BKK Kelas I Pekanbaru mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi akhir periode 5 tahun (2029) sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua Bidang/ seski di BKK Kelas I Pekanbaru. Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Revisi Rencana Aksi Kegiatan (RAK) BKK Kelas I Pekanbaru upaya dukungan manajemen memberikan kontribusi yang bermakna dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit khususnya dan umumnya pembangunan kesehatan untuk menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada dokumen ini, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 02 Januari 2025

Kepala Kantor

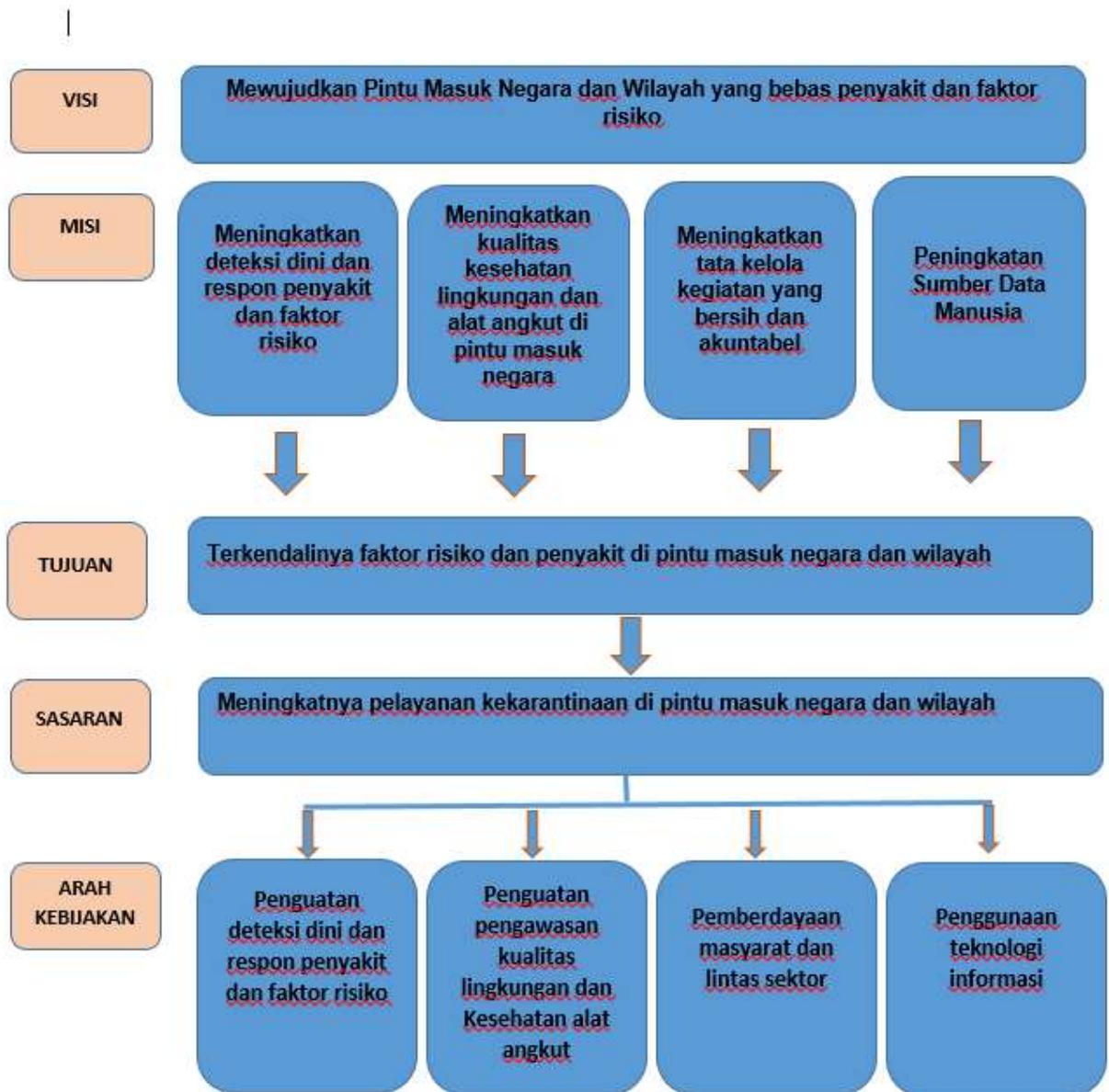


**dr. Aryanti, MM, MKM**

NIP. 196906072002122002



## Lampiran 1 Kerangka Logis Program



## Lampiran 2 Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

IKK	Target					Anggaran				
	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	0,94	0,94	0,95	0,95	0,96	774.575.000	790.066.500	805.867.830	821.985.187	838.424.890
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	96%	96%	97%	97%	98%	458.868.000	468.045.360	477.406.267	486.954.393	496.693.480
Indeks pengendalian di pintu masuk negara	0,88	0,88	0,89	0,89	0,9	939.122.000	957.904.440	977.062.529	996.603.779	1.016.535.855
Nilai kinerja anggaran	84	84	85	85	86	310.462.000	316.671.240	323.004.665	329.464.758	336.054.053
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	94	94	95	95	96	15.413.808.000	15.722.084.160	16.036.525.843	16.357.256.360	16.684.401.487

Kinerja implementasi WBK satker	75	76	77	78	79	107.051.000	109.192.020	111.375.860	113.603.378	115.875.445
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	92%	92%	93%	93%	94%	532.189.000	542.832.780	553.689.436	564.763.224	576.058.489
Persentase Realisasi Anggaran	96%	96%	96%	96%	96%	180.608.000	184.220.160	187.904.563	191.662.654	195.495.908

### Lampiran 3

#### Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Indeks Deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara	Status kinerja deteksi dini faktor risiko di Pelabuhan/bandara/PLB DN berdasarkan hasil pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	<p>Mengukur status pengendalian 4actor risiko dipintu masuk</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• negara</li> <li>• Range indeks 0-1</li> <li>• Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)</li> <li>• Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)</li> </ul>	<p>Bandara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN</li> <li>○ Data kunjungan poliklinik bukan penumpang</li> <li>○ Laporan Kesehatan penjamah makanan untuk pekerja</li> <li>○ Pemeriksaan personil pesawat (termasuk ICV personil kedatangan)</li> </ul> <p>Pelabuhan/PLB DN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN</li> <li>○ Data kunjungan poliklinik bukan penumpang</li> <li>○ Laporan Kesehatan penjamah makanan untuk pekerja</li> <li>○ Pemeriksaan awak kapal (termasuk ICV personil kedatangan)</li> </ul> <p>Masyarakat di wilayah pelabuhan dan bandara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ HIV</li> <li>○ TB</li> <li>○ Malaria (disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang))</li> </ul>
Persentase faktor risiko penyakit	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut,	<p><b>Orang</b></p> <p>Faktor Resiko Ditemukan</p> <p>Suhu tinggi &gt; 37,5</p>

<p>dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan</p>	<p>pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun</p>	<p>barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%</p>	<p>karantina covid positif sakit saturasi &lt;95, hamil &gt;32 minggu Hb &lt;8.5 haji : hamil &lt;14 minggu dan &gt; 26 minggu penyakit menular yang menimbulkan wabah belum vaksin meningitis ICV palsu/exp HIV/TB/Malaria positif</p> <p>Faktor Resiko Yang dikendalikan</p> <p>Rujukan isolasi tolak berangkat vaksinasi pertolongan gawat darurat ijin angkut orang sakit surat layak terbang bagi yang beresiko rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina)</p> <p><i>Alat Angkut</i></p> <p>Faktor Resiko Ditemukan</p> <p>Ditemukan 5actor kecoa, tikus, lalat, penumpang positif</p> <p>Faktor Resiko Yang</p> <p>SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi), Surat bebas karantina kapal</p>
---	--	---	--

			<p>dikendalikan an</p> <p>Laporan desinseksi pesawat One month extention</p> <p><b>Barang</b></p> <p>Faktor Resiko Ditemukan</p> <p>Jenazah penyakit menular dan potensial wabah (meningitis, covid, TB)</p> <p>Faktor Resiko Yang dikendalikan</p> <p>Jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap</p> <p><b>Lingkungan</b></p> <p>Faktor Resiko Ditemukan</p> <p>TTU (suhu dan kelembaban, fisik dan kimia lingkungan), ,</p> <p>TPM (fisik, e coli, MPN coliform, ALT untuk usap alat makan dan masak)</p> <p>Air (e coli, MPN coliform, resiko pencemaran tinggi dan amat tinggi) =&gt; yang tidak memenuhi syarat, indeks tinggi</p> <p>Faktor Resiko Yang</p> <p>TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian 6 factor</p>
--	--	--	---

			dikendalikan
Indeks pengendalian di pintu masuk negara	Status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	<p>Mengukur status pengendalian 7actor risiko dipintu masuk negara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Range indeks 0-1</li> <li>• Bobot dihitung berdasarkan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth)</li> <li>• Rumus indeks adalah nilai empiris dibagi (nilai score maksimal dikurang score minimal)</li> </ul>	<p>Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%</p> <p>Indeks pinjal <math>\leq 1</math> (9 keg x 8 wilker)</p> <p>tidak ditemukan larva anopheles (<math>&lt;1</math>) (4 keg x 8 wilker)</p> <p>Indeks populasi kecoa <math>&lt;2</math> (12 keg x 8 wilker)</p> <p>Indeks populasi lalat <math>&lt; 2</math> (6 keg x 8 wilker)</p> <p>HI perimeter = 0 (12 keg x 8 wilker)</p> <p>HI buffer <math>&lt; 1</math> (12 keg x 8 wilker)</p> <p>lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan (4 keg x 8 wilker)</p> <p>lokus TPP laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan (2 keg x 8 wilker)</p> <p>lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan (2 keg x 11 lokus)</p>
Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan	<p>Target ini berasal dari nilai akumulasi langsung dari aplikasi monev DJA (SMART DJA) Dimana yang menjadi poin-poin perhitungan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyerapan</li> </ul>	Dashboard e monev DJA

	(RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsistensi</li> <li>- CRO</li> <li>- Efisiensi</li> <li>- Nilai efisiensi</li> </ul>	
<p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran</p>	<p>Hasil dari rata-rata geometrik penyampaian/realisasi data keuangan dan perencanaan yang dipantau di aplikasi online monitoring SPAN Kementerian Keuangan</p>	<p>Target ini berasal dari nilai akumulasi langsung dari aplikasi om span (kemenkeu) Dimana yang menjadi poin-poin perhitungan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kualitas perencanaan anggaran yang terdiri dari : Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA</li> <li>- Kualitas Pelaksanaan anggaran yang terdiri dari : penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM</li> </ul>	IKPA dari OM SPAN

		- Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdiri dari capaian output	
Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Satuan Kerja melalui penilaian mandiri (self Assesment) yang dilakukan oleh Satuan Kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang berlaku	Sesuai dengan PERMENPAN, untuk satker yang diusulkan sebagai satker WBK	Penilaian dari APIP/ Esselon I

	dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P.		
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Rekapitulasi pelatihan	Rekapitulasi pelatihan
Persentase Realisasi Anggaran	Penyerapan anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran satker dalam satu tahun anggaran	Jumlah anggaran yang diserap dibagi dengan jumlah pagu anggaran satker dikali 100%	OM SPAN

**Lampiran 4 Matriks Strategi Pencapaian Program**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan kekarantinaa n di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Dini Faktor Risiko di pintu masuk negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Melakukan Penapisan Orang melalui pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan penumpang dan Crew/ABK sesuai dengan kriteria pembatasan yang ditentukan regulasi yang dikeluarkan oleh oleh Satuan gugus tugas Covid 19 dan Peraturan menteri kesehatan di wilayah kerja BKK Kelas II Pekanbaru</li> <li>o Melakukan Pemeriksaan alat angkut yang datang dari luar negeri dan dalam</li> </ul>	7 wilker (wilker Pelabuhan Pekanbaru, Wilker Perawang, Wilker Tj Buton, Wilker Siak, Wilker Futong Wilker SI Panjang), 1 pos (Bandara SSK II)	2025-2029 : 7 wilker (wilker Pelabuhan Pekanbaru, Wilker Perawang, Wilker Buton, Wilker Tj Buton, Wilker Siak, Wilker Futong Wilker SI Panjang), 1 pos (Bandara SSK II)	<p>Bimbingan Tekhnis Kekarantinaa ke Wilayah Kerja Koordinasi Edukasi dan Pemeriksaan HIV dan TB oleh Dokter, Perawat dan Nakes lainnya</p> <p>Perbantuan relawan untuk penanggulangan penularan COVID 19 di pintu masuk negara</p> <p>Pelayanan Kesehatan di Poliklinik</p> <p>Verifikasi terhadap Rumah Sakit dan Klinik yang mengajukan persetujuan penerbitan ICV Pelayanan Mobile Vaksinasi Covid-19</p> <p>Edukasi dan Skrinning HIV, Tb di Wilker</p> <p>Pengawasan Kualitas Udara di Pelabuhan dan Bandara</p> <p>Pengawasan dan Pengendalian Faktor Risiko Lingkungan pada Embarkasi Haji Antara Riau</p> <p>Surveilans Epidemiologi Penyakit Di Wilayah Kerja Pelabuhan dan Bandara</p> <p>Surveilans Kesehatan Kapal, Orang Dan Barang Dalam Rangka Penyelenggaraan Kekarantinaa</p> <p>Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Pekerja di Lingkungan Pelabuhan/ Bandara</p> <p>Pelaksanaan kekarantinaa kesehatan di bandara</p> <p>Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit HIV AIDS</p>	<p>2025 : 774.575.000</p> <p>2026: 790.066.500</p> <p>2027: 805.867.830</p> <p>2028: 821.985.187</p> <p>2029: 838.424.890</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<p>negeri terjangkau melalui pemeriksaan dokumen kesehatan pada kapal dan pemeriksaan faktor risiko kesehatan pada alat angkut.</p> <p>o Melakukan monitoring evaluasi pencapaian kegiatan yang dilaksanakan per bulan</p>			<p>Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit TB            Belanja Bahan Untuk Pelayanan Kesehatan            Pengadaan Bahan Kesehatan Untuk Pengawasan Covid-19 di pelabuhan / Bandara            Perbantuan Relawan dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID 19            Perbantuan Relawan di Pintu Masuk Negara dalam Rangka Penanggulangan COVID 19</p>	
		<p>Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada</p>	<p>o Membuat rencana kegiatan (jadwal, petugas yang melaksanakan, sarana dan prasarana).</p> <p>o Melengkapi sarana dan prasarana yang akan</p>	<p>6 wilker (wilker Pelabuhan Pekanbaru, wilker Sei Duku, Wilker Buatan,</p>	<p>2025-2029 :            7 wilker (wilker Pelabuhan Pekanbaru, Wilker Perawang, Wilker Buatan, Wilker Tj Buton,</p>	<p>Koordinasi Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Embarkasi/Debarkasi Antara Riau ke BKK Kelas I Batam Pelayanan Kesehatan Haji di Embarkasi/Debarkasi Antara Provinsi Riau            Rapat Persiapan Kegiatan Embarkasi Haji Antara Riau            Evaluasi Kegiatan Pelayanan Kesehatan di EHA            Pembinaan Kesehatan Calon Jemaah Haji di Kabupaten Pengawasan Vaksinasi Bagi Calon Jemaah Haji di Kabupaten/Kota</p>	<p>2025 :            458.868.000            2026:            468.045.360            2027:            477.406.267            2028:</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		orang, alat angkut, barang dan lingkungan	<p>digunakan pada saat melaksanakan kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mengupdate SOP-SOP sesuai dengan kondisi pandemic.</li> <li>○ Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan tugas.</li> <li>○ Melakukan koordinasi dengan lintas program/sector dalam melaksanakan setiap kegiatan baik kegiatan rutin yang dilaksanakan di Bandara maupun pelabuhan.</li> </ul>	Wilker Tj Buton, Wilker Siak, Wilker SI Panjang), 1 pos (Bandara SSK II)	Wilker Siak, Wilker Futong Wilker SI Panjang), 1 pos (Bandara SSK II)	<p>Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Jamaah Calon Haji di Kabupaten</p> <p>Surveilans Faktor Risiko Penyakit Pada Jamaah Haji Setelah Kepulangan di Kabupaten melalui pengawasan K3JH</p> <p>Monev Pelaksanaan Embarkasi dan Debarkasi haji antara Provinsi Riau</p> <p>Pelayanan kesehatan pada situasi gawat darurat dan rujukan</p> <p>Pelayanan kesehatan situasi khusus</p> <p>Pengawasan Terhadap RS/Klinik Yang Melaksanakan Penerbitan ICV</p> <p>Pengelolaan Limbah Medis</p> <p>Pengawasan Kasus HIV-AIDS/TB/Penyakit Menular Lainnya Pada ABK / Masyarakat Pelabuhan / Kelompok Risiko Tinggi di Pelabuhan dan Bandara</p> <p>Verifikasi Rumor / Penyelidikan Epidemiologi</p> <p>Operasional Petugas</p> <p>Pengawasan Suhu Tubuh dan Kartu Kewaspadaan ( HAC/eHAC) di Bandara dan Pelabuhan Pada Situasi Wabah/KLB/KKM</p> <p>Layanan Kegawatdaruratan dan Rujukan - pnbp</p> <p>Belanja Bahan dan Perbekalan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Haji</p> <p>Belanja bahan pelayanan vaksinasi</p>	<p>486.954.393</p> <p>2029:</p> <p>496.693.480</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Melakukan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan terbaru sehingga dapat diimplementasikan bersama dan adanya persamaan persepsi dalam melaksanakannya.</li> <li>○ Gencar melaksanakan edukasi dan skrining penyakit menular langsung (HIV AIDS dan Tb) terhadap masyarakat yang ada di wilayah kerja BKK Kelas II Pekanbaru maupun Covid-19, sehingga dapat menekan angka penularan.</li> </ul>				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Melaksanakan desiminasi informasi hasil dari kegiatan skrining yang sudah dilaksanakan, yang bertujuan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan tersebut dan juga mencari solusi jika ada hambatan/kendala di lapangan.</li> <li>○ Melakukan tindakan penyehatan terhadap kapal yang ditemukan FR keberadaan vektor dan BPP,</li> <li>○ Koordinasi dengan agen pelayaran dan pihak ketiga (BUS)</li> </ul>				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sosialisasi dan koordinasi dengan agen pelayaran</li> <li>○ Koordinasi dengan penanggungjawab terminal pelabuhan/bandara, dan pengelolaan TPM</li> <li>○ Pengawasan penumpang dan orang sakit yang datang dan berangkat di bandara dan Pelabuhan</li> <li>○ Pengawasan penumpang datang dan berangkat di Bandara dan Pelabuhan Pelabuhan dan Bandara</li> <li>○ Koordinasi dengan Pihak Airline dan Pt. Angkasa Pura II serta pihak terkait</li> </ul>				

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			o Sosialisasi dan Koordinasi dengan Pihak Airline dan Pt. Angkasa Pura II serta pihak terkait				
		Indeks pengendalian di pintu masuk negara	Melakukan tindakan penyehatan terhadap kapal yang ditemukan faktor risiko keberadaan vektor dan BPP. Koordinasi dengan agen pelayaran dan pihak ketiga (BUS) terkait pengendalian vektor. Sosialisasi dan koordinasi dengan agen pelayaran	6 wilker (wilker Pelabuhan Pekanbaru, wilker Sei Duku, Wilker Buatan, Wilker Tj Buton, Wilker Siak, Wilker Sl Panjang), 1	2025-2029 : 7 wilker (wilker Pelabuhan Pekanbaru, Wilker Perawang, Wilker Buatan, Wilker Tj Buton, Wilker Siak, Wilker Futong Wilker Sl Panjang), 1 pos (Bandara SSK II)	Pembinaan Pengawasan Higiene Sanitasi TPP di Wilayah Pelabuhan/Bandara pengendalian vektor DBD Pemetaan Persiapan Bahan dan Alat Pemasangan Perangkat Identifikasi Tikus dan Pinjal pengendalian vektor Diare Layanan Survei Faktor Resiko Penyakit DBD Survei Jentik pengendalian vektor Diare Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Vektor Penyediaan Reagensia dalam rangka Pemeriksaan Kualitas Makanan, Minuman, dan Air	2025 : 939.122.000 2026: 957.904.440 2027: 977.062.529 2028: 996.603.779 2029: 1.016.535.855

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<p>Koordinasi dengan penanggungjawab terminal pelabuhan/bandara, dan pengelolaan TPP dalam pengawasan sanitasi lingkungan.</p> <p>Mensosialisasikan UU No 6 Tahun 2018.</p> <p>Sosialisasi dan Koordinasi dengan pihak maskapai penerbangan dan PT. Angkasa Pura II serta pihak terkait</p> <p>Melaksanakan tindakan desinfeksi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Bandara,</p>	pos (Bandara SSK II)			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<p>Pelabuhan, dan pada alat angkut.</p> <p>Melakukan pengawasan penanganan limbah medis pada kegiatan pelayanan kesehatan di BKK Kelas II Pekanbaru.</p>				
		<p>Nilai kinerja anggaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Koordinasi yang baik antara operator penginput SMART dja dengan pemegang kegiatan</li> <li>○ Secara disiplin melakukan penginputan data</li> <li>○ revisi halaman III DIPA sesuai kebutuhan</li> </ul>	Kantor Induk	2025-2029 : Kantor Induk	<p>Analisi Kebutuhan dan Perencanaan Pegawai (konsultasi kepusat bidang kepegawaian)</p> <p>Konsultasi Kepala Kantor</p> <p>Medical Check Up ASN</p> <p>Penyusunan dokumen RKAKL</p> <p>Pembahasan dan penelaahan usulan dokumen perencanaan dan anggaran dan revisi anggaran</p> <p>Peyusunan TR PNPB</p> <p>Bimtek Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke Wilker</p> <p>Konsultasi/Koordinasi ke KPPN</p>	<p>2025 : 310.462.000</p> <p>2026: 316.671.240</p> <p>2027: 323.004.665</p> <p>2028: 329.464.758</p> <p>2029: 336.054.053</p>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Terinputnya semua data yang harus diisi secara berkesinambungan</li> </ul>				
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyesuaian kebijakan pelaksanaan anggaran belanja satker yang disebabkan oleh kondisi kahar (force major) yang disebabkan oleh risiko penyebaran COVID 19, serta memperhatikan mengenai penilaian IKPA.</li> <li>Menyesuaikan Halaman III DIPA pada saat revisi</li> <li>Dengan segera melakukan penyelesaian pagu minus,</li> </ul>	Kantor Induk	2025-2029 : Kantor Induk	Langganan Aplikasi Meeting Berbayar Pembayaran gaji dan tunjangan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Alat Pengolah Data Pengadaan Alat Studio Pengadaan Alat Kesehatan	2025 : 15.413.808.000 2026: 15.722.084.160 2027: 16.036.525.843 2028: 16.357.256.360 2029: 16.684.401.487

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<p>sehingga pencairan anggaran tidak terkendala</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Melaporkan data kontrak tepat waktu</li> <li>○ Adanya perhatian terhadap tenggat waktu UP dan TUP</li> <li>○ Menyampaikan LPJ Bendahara tepat waktu</li> <li>○ Pelaksanaan kegiatan memperhatikan output, dan melaporkan secara berkala</li> </ul>				
		Kinerja implementasi WBK satker	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pembentukan Tim WBK BKK Kelas II Pekanbaru</li> <li>○ Penyiapan dokumen pendukung/bukti fisik</li> </ul>	Kantor Induk	2025-2029 : Kantor Induk	Pengelolaan Kantor Berhias Pelayanan Pengadaan barang dan jasa (konsultasi pengadaan barang dan jasa) Penyusunan RUP Penyusunan Laporan e-monev Bapennas Evaluasi SAKIP	2025 : 107.051.000  2026: 109.192.020  2027:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Entri dan Upload data di Sipinal (Sistim penilaian internal)</li> <li>○ Pre assessment dengan Irjen Inventigasi</li> <li>○ Pendampinan dengan Irjen Pembina (Inspektorat III)</li> <li>○ Reviu indicator dengan Bagian Hukormas Ditjen P2P</li> </ul>			Penyusunan Laporan Kinerja, Perjanjian Kerja, Laporan Tahunan, profil Penyusunan Laporan Keuangan Rekonsiliasi PNBK ke Wilker Inventarisasi BMN ke Wilker Pengelolaan Arsip Penyusunan arsip di lingkungan Ditjen P2P Diseminasi/Promosi Informasi Kegiatan Melalui Penyusunan Media KIE Pertemuan RKBMN	111.375.860  2028: 113.603.378  2029: 115.875.445
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Walaupun di masa pandemic, dan kontak dengan banyak orang dihindari, dan dibatakannya beberapa pelatihan akan tetapi pegawai BKK kelas II	Kantor Induk	2025-2029 : Kantor Induk	Pelatihan Bidang Kekarantinaan dan Surveilans Epidemiologi Webinar di Bidang Pelayanan Kesehatan Peningkatan Kompetensi/Diklat/Ujian Kompetensi Latsar CPNS dan PPPK Diklat Pranata Humas Biaya Diklat Bahasa Inggris Pelatihan SAKIP	2025 : 532.189.000  2026: 542.832.780  2027: 553.689.436  2028:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
			Pekanbaru tetap mendapatkan penambahan kompetensi melalui daring/online				564.763.224 2029: 576.058.489
8		Persentase Realisasi Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan</li> <li>• Meningkatkan kualitas perencanaan</li> <li>• melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa</li> <li>• meningkatkan monitoring dan evaluasi</li> </ul>	Kantor Induk	2025-2029 : Kantor Induk	Penyusunan anggaran Kegiatan pembahasan anggaran	2025 : 180.608.000 2026: 184.220.160 2027: 187.904.563 2028: 191.662.654 2029: 195.495.908

